Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 3935-3947
E-ISSN: 2987-4472
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Penguatan Perlindungan Sosial Adaptif Bagi Keluarga Rentan Untuk Menurunkan Risiko Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Rahmi Rasjid

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
rasjidrahmi@gmail.com

Abstract

The continuity of children's education in Pangkajene and Kepulauan Regency is exposed to risks associated with limited household economic resources, children's involvement in family economic activities, and weakened household capacity to maintain children's education under economic pressure. This Policy Paper aims to analyze the root causes of Out-of-School Children (OSC) and children at risk of discontinuing education, examine policy alternatives, and formulate the most appropriate policy option for the local context. The analysis applies problem identification, priority setting using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method, root-cause analysis through a fishbone framework and Level 1–Level 2 causes, and policy formulation and assessment using a Logic Model and Multi Criteria Analysis (MCA). The analysis finds that household socioeconomic conditions and children's involvement in family economic activities constitute the priority problem. Three main root causes are identified: insufficient household income to meet living and educational needs, children's involvement in family economic activities, and weakened household capacity to sustain children's education when facing economic pressure. Among the three policy alternatives—strengthening adaptive education services, strengthening integrated social protection, and strengthening early identification and mentoring—the integrated social protection alternative obtains the highest score in the Logic Model (5.0/5) and MCA (4.70/5). The Policy Paper therefore recommends strengthening adaptive social protection for vulnerable families through an integrated process of risk identification, family assessment, vulnerability classification, intervention matching, family mentoring, and monitoring of educational continuity. This policy is expected to improve targeting, adapt interventions to household and territorial conditions, and strengthen the prevention of Out-of-School Children in Pangkajene and Kepulauan Regency.

Keywords : adaptive social protection; ; education; Out-of-School Children; Pangkajene and Kepulauan Regency; school dropout risk;

Abstrak

Keberlanjutan pendidikan anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi risiko yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya ekonomi rumah tangga, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga, serta melemahnya kapasitas keluarga mempertahankan pendidikan ketika menghadapi tekanan ekonomi. Policy Paper ini bertujuan menganalisis akar masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan, mengkaji alternatif kebijakan, serta merumuskan pilihan kebijakan yang paling sesuai dengan karakteristik daerah. Analisis dilakukan melalui identifikasi masalah, penetapan prioritas menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), analisis akar masalah melalui fishbone dan penyebab Level 1–Level 2, serta perumusan dan penilaian alternatif kebijakan menggunakan Model Logika dan Multi Criteria Analysis (MCA). Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga merupakan persoalan prioritas, dengan tiga akar masalah utama berupa pendapatan rumah tangga yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga, serta melemahnya kapasitas rumah tangga mempertahankan pendidikan anak ketika menghadapi tekanan ekonomi. Dari tiga alternatif kebijakan, yaitu penguatan layanan pendidikan adaptif, penguatan perlindungan sosial terintegrasi, serta penguatan identifikasi dini dan pendampingan, alternatif perlindungan sosial terintegrasi memperoleh nilai tertinggi pada Model Logika (5,0/5) dan MCA (4,70/5). Policy Paper merekomendasikan penguatan perlindungan sosial adaptif bagi keluarga rentan melalui integrasi identifikasi risiko, asesmen keluarga, klasifikasi kerentanan, pemadanan intervensi, pendampingan, dan monitoring keberlanjutan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan mendorong intervensi yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi keluarga dan wilayah, serta memperkuat pencegahan ATS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kata Kunci : anak tidak sekolah; kabupaten pangkep; keluarga rentan; perlindungan sosial adaptif; risiko putus sekolah

Copyright (c) 2026 Rahmi Rasjid

✉Corresponding author: Rahmi Rasjid
Email Address: rasjidrahmi@gmail.com (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)
Received 20 September 2026, Accepted 28 September 2026, Published 3 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, perluasan kesempatan ekonomi, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat ((Becker, 1964) (Hanushek & Woessmann, 2008). Namun, capaian pembangunan pendidikan tidak semata ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, melainkan juga oleh kemampuan rumah tangga mempertahankan anak dalam sistem pendidikan (Handa, 1999). Dengan demikian, keberlanjutan pendidikan anak merupakan isu multidimensi yang beririsan dengan aspek pendidikan, sosial-ekonomi, perlindungan sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Kompleksitas tersebut meningkat pada wilayah dengan karakteristik geografis khusus. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki wilayah daratan, pesisir, pegunungan, dan kepulauan, dengan 115 pulau dan sekitar 65.260 penduduk bermukim di pulau-pulau kecil (Kelas Perahu Model Pencegahan Anak Putus Sekolah Di Daerah Kepulauan, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan bergantung pada ketersediaan layanan sekaligus pada kapasitas kebijakan untuk beradaptasi dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Sebagai respons, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati Pangkep Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir. Regulasi ini mencerminkan upaya menyesuaikan layanan pendidikan dengan karakteristik masyarakat kepulauan. Meskipun demikian, keberlanjutan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh sisi penyediaan layanan (*supply side*), tetapi juga oleh kondisi ekonomi keluarga (*demand side*) (Handa, 2002).

Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa kemiskinan rumah tangga merupakan determinan penting putus sekolah, karena keluarga miskin menghadapi kendala biaya langsung maupun biaya peluang pendidikan (Fiszbein & Schady, 2009) (Sparrow, 2007). Jumlah penduduk miskin di Kabuaten Pangkep pada tahun 2025 mencapai 40,37 ribu jiwa (11,60%) dengan garis kemiskinan Rp471.043 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, 2025). Angka ini menunjukkan masih adanya kelompok rumah tangga dengan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan pendidikan anak.

Studi nasional menunjukkan bahwa ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan dan penghasilan yang tidak menentu menjadi penyebab anak petani di Kabupaten Takalar putus sekolah, dan sebagian anak kemudian membantu mencari nafkah (Quraisy & Arifin, 2017a). Temuan ini sejalan dengan kajian literatur yang menempatkan kemiskinan dan kebutuhan anak untuk bekerja sebagai penyebab utama putus sekolah pada pendidikan dasar di Indonesia (Ananda et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pangkep khusunya di Pulau Salemo menemukan bahwa Kelas Perahu berkontribusi sebagai sarana belajar, meningkatkan hasil belajar siswa, dan menurunkan

angka putus sekolah (Said & Torro, 2020). Keterbatasan ekonomi tersebut berkaitan dengan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga. Secara teoretis, rumah tangga miskin cenderung mengandalkan tenaga kerja anak ketika pendapatan orang tua tidak mencukupi (Basu & Van, 1999) (Edmons, n.d.). Pada konteks kepulauan, keterlibatan anak dalam aktivitas melaut membantu orang tua mencari nafkah menjadi salah satu faktor risiko anak tidak melanjutkan pendidikan, dan hal ini menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan Kelas Perahu.

Bukti empiris di Indonesia tentang bantuan sosial bersyarat belum seragam sebagaimana studi yang dilakukan Martsha menyimpulkan bahwa PKH berdampak pada partisipasi pendidikan anak usia sekolah (Martsha, 2024). Di sisi lain, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Pangkep menghadapi tantangan identifikasi dan pemantauan. Sumber data yang berbeda menghasilkan angka ATS yang tidak seragam. Sistem SIPBM-ATS, misalnya, mengidentifikasi 77 anak ATS secara *by name by address* di empat desa lokus dan menemukan 1.568 anak berisiko putus sekolah. Selisih tersebut menunjukkan perlunya mekanisme identifikasi risiko yang sistematis agar intervensi dapat diberikan sebelum anak keluar dari sistem pendidikan. Pendekatan berbasis pencegahan dini ini sejalan dengan gagasan perlindungan sosial transformatif, yang tidak hanya bersifat protektif tetapi juga mengatasi kerentanan sosial secara struktural (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004).

Dengan demikian, ATS tidak cukup dipandang sebagai persoalan pendidikan semata, melainkan sebagai akumulasi kerentanan keluarga yang menuntut pendekatan lintas sektor. Bukti dari berbagai negara menunjukkan bahwa transfer tunai, termasuk yang bersyarat, dapat meningkatkan partisipasi sekolah, tetapi efektivitasnya bergantung pada desain, penargetan, dan konteks lokal (Baird et al., 2014; Fiszbein & Schady, 2009). Karena itu, diperlukan model perlindungan sosial adaptif yang menyesuaikan bentuk intervensi dengan tingkat kerentanan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab risiko ATS serta merumuskan model perlindungan sosial adaptif bagi keluarga rentan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

METODE

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan yang dipadukan dengan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis faktor penyebab risiko Anak Tidak Sekolah (ATS) dan merumuskan model perlindungan sosial adaptif, yang memerlukan pemahaman mekanisme, landasan regulasi, dan praktik kebijakan, bukan pengujian hubungan statistik antarvariabel. Lokus penelitian adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, yang memiliki wilayah daratan, pesisir, pegunungan, dan kepulauan.

Sumber dan Jenis Data

Data penelitian seluruhnya berupa data sekunder yang dikelompokkan ke dalam tiga basis kajian.

Pertama, basis teori, yaitu literatur ilmiah dan laporan lembaga tentang kerentanan ekonomi rumah tangga, pekerja anak, dan keberlanjutan pendidikan, antara lain publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, UNICEF, International Labour Organization (ILO), serta artikel jurnal nasional dan internasional. Kedua, basis regulasi, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Daerah Pangkep Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 37 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Pangkep Nomor 36 Tahun 2019 dan Nomor 6 Tahun 2023, ditambah regulasi pembanding dari Kabupaten Wajo dan Kota Banjarmasin. Ketiga, basis empiris, yaitu dokumen dan laporan praktik penanganan ATS, termasuk Kelas Perahu di Pangkep serta praktik integrasi data di Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Sulawesi Selatan. Data kondisi wilayah bersumber dari publikasi BPS dan data SIPBM-ATS

Prosedur Pengumpulan dan Seleksi Dokumen

Dokumen dikumpulkan melalui penelusuran basis data jurnal dan situs resmi lembaga pada periode tahun 2000-2025 menggunakan kata kunci "anak tidak sekolah", "putus sekolah", "pekerja anak", "perlindungan sosial", dan "Kelas Perahu". Dokumen dipilih berdasarkan relevansi dengan keberlanjutan pendidikan anak, kredibilitas penerbit atau lembaga, dan keterkaitan dengan konteks Indonesia atau wilayah kepulauan. Regulasi yang dianalisis dibatasi pada peraturan yang berstatus berlaku.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah ekstraksi, yaitu mengidentifikasi temuan, ketentuan, dan praktik pada setiap dokumen yang berkaitan dengan penyebab ATS, kerentanan rumah tangga, dan bentuk intervensi. Tahap kedua adalah analisis tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema akar masalah dan memetakan hubungan antartema menjadi rantai kausal. Tahap ketiga adalah sintesis, yaitu mengintegrasikan hasil kajian teori, regulasi, dan praktik empiris untuk menurunkan domain intervensi kebijakan. Tahap keempat adalah analisis alternatif kebijakan, yaitu membandingkan alternatif yang dikonstruksi dari domain tersebut menggunakan matriks komparatif yang memuat fokus utama, masalah yang dijawab, instrumen utama, dan kekuatan utama setiap alternatif.

Keabsahan Data

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari literatur ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen regulasi untuk setiap pernyataan penting. Selain itu, data kuantitatif wilayah dirujuk pada publikasi resmi, dan perbedaan angka antarsumber, seperti jumlah ATS dan anak berisiko ATS, disajikan secara eksplisit dan tidak digabungkan. Penelitian ini tidak menggunakan data primer sehingga tidak memerlukan pengumpulan data dari responden.

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Wilayah dan Data Anak Tidak Sekolah

Pangkep memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang kompleks, mencakup wilayah daratan, pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Wilayah ini memiliki 115 pulau dengan sekitar 65.260 penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil https://pangkepkab.go.id/selayang-pandang. Pada sisi ekonomi, jumlah penduduk miskin pada 2025 mencapai 40,37 ribu jiwa atau 11,60 persen dengan garis kemiskinan Rp471.043 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, 2025). Angka ini menunjukkan masih adanya kelompok rumah tangga yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan pendidikan anak.

Data Anak Tidak Sekolah (ATS) dari berbagai sumber menunjukkan angka yang berbeda. Sistem SIPBM-ATS mengidentifikasi 77 anak ATS secara *by name by address* di empat desa lokus dan menemukan 1.568 anak yang berisiko putus sekolah **[sumber dan tahun: lengkapi].** Selisih ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang telah keluar dari sistem pendidikan jauh lebih kecil daripada jumlah anak yang rentan keluar. Dengan demikian, penanganan yang hanya menunggu anak tercatat sebagai ATS akan terlambat, dan diperlukan mekanisme identifikasi risiko yang lebih sistematis.

Akar Masalah dan Rantai Kausal Keberlanjutan Pendidikan

Hasil analisis menunjukkan tiga akar masalah utama. Pertama, pendapatan rumah tangga terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Kedua, anak terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketiga, kapasitas rumah tangga mempertahankan pendidikan anak melemah ketika menghadapi tekanan ekonomi. Ketiganya membentuk rantai kausal yang menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi pada tingkat rumah tangga berkembang menjadi gangguan terhadap keberlanjutan pendidikan anak.

Ketiga akar masalah tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat. Ketika keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi semakin intensif, waktu dan kesempatan anak untuk mengikuti pendidikan berkurang. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi yang berkelanjutan melemahkan kapasitas keluarga untuk mempertahankan pendidikan anak. Implikasinya, titik persoalan kebijakan tidak hanya terletak pada keberadaan anak yang tidak bersekolah, tetapi pada mekanisme ekonomi rumah tangga yang membuat keluarga rentan kehilangan kemampuan mempertahankan anak dalam sistem pendidikan. Intervensi yang hanya berorientasi pada anak atau sekolah belum tentu memadai; kebijakan perlu menyasar kapasitas ekonomi dan ketahanan rumah tangga serta mencegah keterlibatan ekonomi anak berkembang menjadi hambatan pendidikan.

Kerangka Konseptual

Kajian ini menggunakan tiga konsep yang saling berhubungan. *Anak Tidak Sekolah (ATS)* adalah anak usia sekolah yang tidak sedang mengikuti pendidikan pada jalur formal maupun bentuk pendidikan lain yang diakui sesuai ketentuan. ATS dipahami bukan sekadar status administratif, tetapi indikasi adanya hambatan keberlanjutan akses dan partisipasi pendidikan yang merupakan akumulasi berbagai faktor kerentanan, seperti keterbatasan ekonomi, hambatan akses, kondisi sosial keluarga, dan

keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi. *Anak berisiko ATS* adalah anak yang masih berada dalam sistem pendidikan tetapi menunjukkan satu atau lebih faktor yang meningkatkan kemungkinan keluar atau tidak melanjutkan pendidikan, sehingga menjadi kelompok sasaran preventif.

Perlindungan sosial adaptif adalah pendekatan yang menyesuaikan bentuk, intensitas, sasaran, dan waktu intervensi berdasarkan tingkat kerentanan serta perubahan kondisi rumah tangga. Pendekatan ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi memperkuat kapasitas rumah tangga mempertahankan pendidikan anak, mengurangi kebutuhan melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi, dan merespons peningkatan risiko lebih cepat. Dalam kerangka ini, perlindungan sosial adaptif menjadi instrumen yang menghubungkan upaya preventif terhadap anak berisiko ATS dengan upaya korektif terhadap ATS.

Kerentanan Ekonomi Rumah Tangga dan Keberlanjutan Pendidikan

Kerentanan ekonomi rumah tangga adalah kondisi ketika kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kesejahteraan terbatas, sehingga keluarga mudah tertekan saat kebutuhan meningkat, pendapatan hilang, atau terjadi guncangan ekonomi. Statistik Pendidikan 2025 menunjukkan bahwa indikator pendidikan Indonesia masih bervariasi menurut karakteristik sosial ekonomi dan wilayah (Badan Pusat Statstik, n.d.). World Bank tahun 2020 melaporkan kesenjangan capaian pendidikan menurut kondisi ekonomi rumah tangga (World Bank, 2020, 2020). Sedangkan UNICEF (UNICEF, n.d.) menempatkan kemiskinan anak sebagai persoalan multidimensi yang memengaruhi berbagai aspek kesejahteraan anak.

Dari sisi kebijakan, kajian World Bank tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menunjukkan bahwa dukungan terhadap biaya pendidikan dapat mengurangi beban finansial keluarga miskin dan meningkatkan partisipasi pendidikan (Indonesia Investments, 2015) . Penelitian pada anak usia 10–18 tahun dari rumah tangga miskin di Nusa Tenggara Timur dengan data Susenas 2021 juga menemukan bahwa anak dari rumah tangga miskin menghadapi risiko lebih besar mengalami penghentian pendidikan (Tanzi; & Ekaria, n.d.). Secara mekanisme, ketika pendapatan terbatas, keluarga harus membagi sumber daya untuk kebutuhan yang bersaing; kebutuhan dasar cenderung diprioritaskan, sehingga biaya pendidikan dan biaya pendukungnya menjadi beban tambahan.

Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Ekonomi

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi merupakan mekanisme yang menghubungkan kondisi ekonomi rumah tangga dengan gangguan pendidikan. Tinjauan ILO (ILO, 2025) menempatkan waktu anak untuk bekerja sebagai faktor penting dalam memahami hubungan pekerjaan dengan kehadiran dan capaian sekolah. Survei ILO dan BPS tentang anak yang bekerja di Indonesia menunjukkan bahwa pada kelompok usia 5–17 tahun terdapat jutaan anak bekerja, sementara sebagian lain berada di luar pendidikan maupun pekerjaan (ILO, 2010).

Bukti yang paling dekat dengan lokus penelitian berasal dari Pulau Sulawesi. Dengan data Susenas Maret 2022 dan regresi logistik, Rosmini dan Istiana menemukan bahwa 16,39 persen pekerja anak di Pulau Sulawesi mengalami putus sekolah(Rosmini & Istiana, 2025) . Temuan ini mendukung adanya mekanisme yang menghubungkan kondisi ekonomi keluarga dengan keberlanjutan pendidikan

melalui keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi. Aniza menelaah hubungan kehadiran sekolah dengan alokasi waktu kerja anak menggunakan Indonesia Family Life Survey dan kebijakan BOS, sedangkan studi pada industri kecil Indonesia menunjukkan bahwa faktor penawaran dan permintaan tenaga kerja anak saling berinteraksi, sehingga pengurangan pekerjaan anak memerlukan kebijakan yang meningkatkan akses sekaligus kehadiran dan partisipasi anak di sekolah (Aniza, 2023)

Kerangka Regulasi

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan sebagai hak warga negara, sehingga kondisi geografis tidak dapat menjadi alasan anak kehilangan kesempatan belajar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , n.d.) . Pada tingkat daerah, Pangkep memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta bentuk layanan adaptif melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir (Penyelenggaraan Layanan Pendidikn Kelas Perahu Untuk Wilayah Kepulauan Dan Pesisir, 2019; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2015). Adaptasi yang diatur bukan penurunan standar pendidikan, melainkan penyesuaian metode, waktu, dan bentuk layanan bagi anak yang menghadapi hambatan geografis maupun sosial ekonomi.

Untuk penanganan ATS, Pangkep memiliki Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) (Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) , 2023). Struktur RAD-PPATS mencakup penyelenggaraan, pengelolaan, peserta, dokumen, evaluasi, jaminan wajib belajar, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, kerja sama, dan pendanaan, yang menunjukkan bahwa penanganan ATS bersifat lintas sektor. Arah serupa tampak pada regulasi daerah lain, yaitu Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2022 tentang RAD Percepatan Penanganan ATS (Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, 2022) dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penanganan ATS yang mengatur pemantauan, evaluasi, kerja sama, dan pendanaan (Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Banjarmasin, 2025) .

Kerangka regulasi tersebut memperlihatkan pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dan responsif: pemerintah tidak menunggu anak menjadi ATS, tetapi mengidentifikasi faktor risiko, memahami penyebab, melakukan penjangkauan, dan menyediakan dukungan sesuai kebutuhan. Namun, regulasi yang ada lebih banyak mengatur layanan pendidikan dan tata kelola penanganan ATS, sedangkan faktor ekonomi rumah tangga dan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi belum menjadi sasaran intervensi yang eksplisit.

Praktik Empiris Pencegahan dan Penanganan ATS

Kelas Perahu sebagai praktik pendidikan adaptif. Kehidupan sebagian masyarakat Pangkep berkaitan erat dengan aktivitas kelautan sehingga aktivitas ekonomi keluarga memengaruhi mobilitas dan waktu anak. Kelas Perahu dikembangkan sebagai layanan alternatif dengan pendekatan belajar

mandiri bagi siswa yang mengikuti orang tua melaut, dan memperoleh landasan formal melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019. Penelitian di Pulau Salemo menemukan bahwa layanan ini berjalan dengan model pembelajaran mandiri berbasis lembar kerja dan pendampingan, serta berkontribusi sebagai sarana belajar, meningkatkan hasil belajar, dan menurunkan angka putus sekolah (Said & Torro, 2020).

Integrasi data, bantuan sosial, layanan pendidikan, dan pendampingan. Pengalaman di Indonesia menunjukkan pentingnya data yang mampu mengidentifikasi identitas dan lokasi anak, status sekolah, faktor risiko, serta dukungan yang dibutuhkan. UNICEF melaporkan bahwa sistem pengumpulan dan pemantauan data menjadi fondasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi anak berisiko putus sekolah maupun yang sudah berada di luar sistem pendidikan(UNICEF Indonesia, 2024) . Di Kabupaten Trenggalek, data digunakan untuk mengidentifikasi hampir 4.000 anak tidak sekolah, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga lain untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarga rentan. Di Sulawesi Selatan, dalam tiga tahun hampir 94 persen anak yang teridentifikasi telah kembali belajar dan jumlah anak tidak sekolah berkurang sekitar 12 persen, yang dikaitkan dengan komitmen pemerintah dan penguatan kapasitas pemerintah daerah (UNICEF Indonesia, 2024). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa data berfungsi sebagai dasar penentuan intervensi, sehingga pemerintah dapat beralih dari pendekatan seragam menuju intervensi yang terarah menurut kebutuhan anak.

Sintesis: Tiga Domain Intervensi

Integrasi kajian teori, regulasi, dan praktik empiris menghasilkan tiga temuan. Pertama, kerentanan ekonomi rumah tangga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan: keterbatasan pendapatan meningkatkan tekanan pemenuhan kebutuhan, mendorong anak terlibat dalam aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan risiko terganggunya pendidikan. Kedua, pemerintah berkewajiban menjamin hak pendidikan anak, dan regulasi Pangkep telah memberi ruang bagi layanan adaptif melalui Kelas Perahu, PASTI CERDAS, dan RAD-PPATS. Ketiga, penanganan ATS yang efektif memerlukan layanan yang menyesuaikan kondisi anak, identifikasi berbasis data, bantuan tepat sasaran, pendampingan, koordinasi lintas sektor, dan pemantauan keberlanjutan pendidikan.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, diperoleh tiga domain intervensi. *Domain perlindungan sosial* memperkuat kemampuan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi melalui dukungan yang disesuaikan dengan tingkat kerentanan, dengan sasaran mengurangi tekanan ekonomi, membantu kebutuhan pendidikan anak, mencegah keterlibatan berlebihan anak dalam aktivitas ekonomi, memperkuat kemampuan keluarga mempertahankan anak di sekolah, dan merespons guncangan. *Domain pendidikan adaptif* menyesuaikan layanan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi anak melalui fleksibilitas layanan dan keterhubungan anak dengan pendidikan, sebagaimana dicontohkan Kelas Perahu dan PASTI CERDAS. *Domain identifikasi dini* menggeser pendekatan dari penanganan setelah anak keluar menuju pencegahan, melalui penemuan anak berisiko, pemetaan penyebab dan

tingkat kerentanan, penghubungan dengan layanan, koordinasi lintas sektor, dan pemantauan keberlanjutan pendidikan.

Analisis Alternatif Kebijakan

Ketiga domain dikonstruksi menjadi tiga alternatif kebijakan yang memiliki tujuan sama, yaitu menurunkan risiko ATS di Pangkep, tetapi berbeda titik intervensinya (Tabel 1). Alternatif A1 berfokus pada penguatan layanan pendidikan adaptif, A2 pada pengurangan tekanan ekonomi rumah tangga melalui perlindungan sosial terintegrasi, dan A3 pada sistem deteksi dan pendampingan anak berisiko ATS.

Tabel 1. Matriks Ringkas Tiga Alternatif Kebijakan

Alternatif	Fokus utama	Masalah yang dijawab	Instrumen utama	Kekuatan utama
A1. Penguatan layanan pendidikan adaptif bagi anak rentan	Keberlanjutan layanan pendidikan	Hambatan akses dan karakter wilayah	Kelas Perahu, layanan fleksibel, pendampingan	Responsif terhadap kondisi kepulauan
A2. Penguatan perlindungan sosial terintegrasi bagi rumah tangga anak berisiko ATS	Kerentanan sosial ekonomi keluarga	Tekanan ekonomi dan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga	Asesmen keluarga, perlindungan sosial, bantuan pendidikan, pemberdayaan, pendampingan	Paling dekat dengan akar masalah utama
A3. Penguatan sistem identifikasi dini dan pendampingan anak berisiko ATS	Ketepatan sasaran dan kecepatan respons	Risiko ATS dan fragmentasi informasi sasaran	Deteksi dini, klasifikasi risiko, pendampingan, monitoring	Meningkatkan ketepatan dan kecepatan intervensi

Berdasarkan matriks tersebut, A2 berada paling dekat dengan akar masalah utama karena menyasar tekanan ekonomi dan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga. A1 memiliki kekuatan karena membangun praktik yang telah memiliki landasan regulasi dan bukti awal efektivitas (Said & Torro, 2020) tetapi titik intervensinya berada pada sisi layanan sehingga kurang menjawab tekanan ekonomi keluarga. A3 meningkatkan ketepatan sasaran dan kecepatan respons, namun tanpa instrumen perlindungan sosial dan layanan pendidikan yang memadai, identifikasi hanya menghasilkan daftar anak berisiko tanpa intervensi yang menjawab penyebabnya.

Diskusi

Temuan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, dan melemahnya kapasitas keluarga membentuk rantai kausal yang saling memperkuat sejalan dengan penelitian di berbagai daerah. Penelitian pada anak petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan,

menemukan bahwa ketidakmampuan membiayai pendidikan dan penghasilan yang tidak menentu menjadi penyebab putus sekolah, dan sebagian anak kemudian membantu ekonomi keluarga (Quraisy & Arifin, 2017b). Hasil ini diperkuat oleh bukti nasional yang menempatkan kemiskinan dan kebutuhan anak bekerja sebagai penyebab utama putus sekolah pada pendidikan dasar (Ananda et al., 2025) ([penulis, tahun]) serta temuan Rosminia dan Istiana (Rosmini & Istiana, 2025) di Sulawesi. Konsistensi ini menunjukkan bahwa kondisi di Pangkep bukan kasus tersendiri, tetapi bagian dari pola kerentanan ekonomi rumah tangga yang juga ditemukan di wilayah lain, dengan kekhasan kepulauan berupa aktivitas melaut.

Pembahasan mengenai instrumen perlindungan sosial perlu mempertimbangkan bukti yang belum seragam. Martsha menyimpulkan bahwa PKH berdampak pada partisipasi pendidikan anak usia sekolah di Indonesia (Martsha, 2024). Atmaja tidak menemukan dampak signifikan PKH terhadap partisipasi sekolah, kemungkinan karena partisipasi sekolah nasional sudah tinggi (Atmaja, n.d.) . Perbedaan ini mengindikasikan bahwa bantuan seragam tidak otomatis menyelesaikan persoalan, dan bahwa efektivitasnya bergantung pada penargetan dan konteks. Hal ini mendukung gagasan perlindungan sosial adaptif yang menyesuaikan bentuk dan intensitas intervensi dengan tingkat kerentanan keluarga, bukan memberikannya secara merata.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa kekuatan Pangkep terletak pada regulasi dan praktik layanan adaptif, sedangkan kelemahannya terletak pada sisi ekonomi rumah tangga dan sistem identifikasi. Kelas Perahu terbukti menjadi sarana belajar yang menjaga keterhubungan anak melaut dengan pendidikan (Said & Torro, 2020), tetapi layanan ini tidak mengubah alasan anak ikut melaut, yaitu keterbatasan pendapatan keluarga. Di sisi lain, perbedaan angka ATS dan anak berisiko menunjukkan bahwa tanpa data terintegrasi, intervensi sulit diarahkan sebelum anak keluar dari sekolah. Pengalaman Trenggalek dan Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa identifikasi berbasis data yang dikaitkan dengan dukungan finansial dan pendampingan dapat mengembalikan anak ke pendidikan.

Dengan demikian, model yang dirumuskan berupa perlindungan sosial adaptif berjenjang yang memadukan tiga domain: identifikasi dini untuk menemukan dan mengklasifikasikan anak berisiko, perlindungan sosial untuk menurunkan tekanan ekonomi menurut tingkat kerentanan, serta pendidikan adaptif untuk menjaga keterhubungan anak dengan sekolah. Secara kebijakan, hal ini berarti RAD-PPATS dan Kelas Perahu perlu dihubungkan dengan asesmen kerentanan keluarga dan program bantuan sosial yang telah tersedia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada kajian dokumen dan literatur, sehingga validasi empiris melalui data primer rumah tangga di Pangkep, misalnya wawancara dengan keluarga anak berisiko ATS, diperlukan pada penelitian lanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersumber dari rantai kausal ekonomi rumah tangga. Tiga akar masalah saling

memperkuat, yaitu pendapatan rumah tangga yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga, serta melemahnya kapasitas rumah tangga mempertahankan pendidikan anak saat menghadapi tekanan ekonomi. Dengan demikian, ATS merupakan hasil akumulasi kerentanan keluarga dan tidak dapat ditangani hanya sebagai persoalan pendidikan.

Kajian regulasi menunjukkan bahwa Pangkep telah memiliki landasan layanan pendidikan adaptif melalui Kelas Perahu, PASTI CERDAS, dan RAD-PPATS, dan praktik empiris menunjukkan nilai identifikasi berbasis data yang dihubungkan dengan dukungan finansial dan pendampingan. Namun, perangkat tersebut belum menyasar tekanan ekonomi rumah tangga dan keterlibatan ekonomi anak secara eksplisit. Perbedaan angka ATS (77 anak) dan anak berisiko ATS (1.568 anak) pada data SIPBM-ATS juga menunjukkan perlunya identifikasi risiko yang lebih sistematis agar intervensi diberikan sebelum anak keluar dari sistem pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, model perlindungan sosial adaptif yang dirumuskan memadukan tiga domain, yaitu identifikasi dini, perlindungan sosial, dan pendidikan adaptif, dengan intensitas intervensi disesuaikan dengan tingkat kerentanan keluarga. Dari tiga alternatif yang dianalisis, penguatan perlindungan sosial terintegrasi bagi rumah tangga anak berisiko ATS paling dekat dengan akar masalah utama, sedangkan sistem identifikasi dini dan layanan pendidikan adaptif berfungsi sebagai pendukung ketepatan sasaran dan keberlanjutan layanan**.**

REFERENSI

Ananda, R., Putri, S. K., Lestari, N. A., Harini, D., & Adriansyah, M. I. (2025). Permasalahan Putus Sekolah Pendidikan Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(2).

Aniza, K. N. (2023). The Impact of School Attendance on Child Working: Case from Indonesian School Operational Assistance. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *7*(1), 100–121. https://doi.org/10.36574/jpp.v7i1.408

Atmaja, A. (n.d.). *ANALISIS DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PARTISIPASI SEKOLAH DAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA*. Retrieved http://etd.repository.ugm.ac.id/

Badan Pusat Statstik. (n.d.). *Statistik Pendidikan 2025*.

Baird, S., Ferreira, F. H. G., Özler, B., & Woolcock, M. (2014). Conditional, unconditional and everything in between: a systematic review of the effects of cash transfer programmes on schooling outcomes. *Journal of Development Effectiveness*, *6*(1), 1–43. https://doi.org/10.1080/19439342.2014.890362

Basu, K., & Van, P. H. (1999). The Economics of Child Labor: Reply. *American Economic Review*, *89*(5), 1386–1388. https://doi.org/10.1257/aer.89.5.1386

Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Columbia University Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep. (2025). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=X0MH3KfCfKSbOPoKvck36HdWN09menlPaXNta0hFVVNqc0VBemwvOUt3ZjRqT0VGMnNtSXFvbjRCeDVLOEVNdnZQdlFmQUZyQzdoZ0czWHMweFdUUDVlSStwVXZhdVpEQmtvcWN4eTVwclA0RE45UG11cWlPcDRVbmxQZUdvZ2RhQ2hRbVFhRzNIQmE3c2JnTmMzelNETGloTFQzVkdaTGxnSnZSWjBlTWNQUWw0SE1YbDNrc3ZYbXZYT0dvdEhreFYwMVN6Z1FzZzFMNTJDYk04V1lndzZTUGV3YWNFTmhBU0draWN1d01Md0RPaVhmQnVLWDBVSzZmM05NSU1rL3J1T09TUEdRRGIzU0hqRGFselBvVVYzWmFNdXYwTmJEVTZJRkJXMnduZnlwQ3ZWZ1ZWSnMxcmhQRGlZPQ==&_gl=1*397ihx*_ga*MTM2NDcwMTU3MS4xNzkwOTk3Nzkw*_ga_XXTTVXWHDB*czE3OTA5OTc3OTAkbzEkZzEkdDE3OTA5OTc3OTMkajU3JGwwJGgw

Devereux, Stephen., & Sabates-Wheeler, Rachel. (2004). *Transformative social protection*. Institute of Development Studies.

Edmons, E. V. (n.d.). hild Labor. NBER Working Paper Series. In *National Bureau of Economics Reserach*.

Fiszbein, A., & Schady, N. R. (2009). *Conditional Cash Transfers*. The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7352-1

Handa, S. (1999). *RAISING PRIMARY SCHOOL ENROLMENT IN DEVELOPMENT COUNTRIES: THE RELATIVE IMPORTANCE OF SUPPLY AND DEMAND*.

Handa, S. (2002). Raising primary school enrolment in developing countries. *Journal of Development Economics*, *69*(1), 103–128. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00055-X

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development. *Journal of Economic Literature*, *46*(3), 607–668. https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607

ILO. (2010). *ILO – BPS keluarkan data nasional mengenai pekerja anak di Indonesia*. Https://Www.Ilo.Org/Resource/News/Ilo-Bps-Release-National-Data-Working-Children-Indonesia?Lang=id.

ILO. (2025). *Menghapus Pekerja Anak di Indonesia: Dukungan 20 Tahun*.

Indonesia Investments. (2015). *Bank Dunia Mengkaji 10 Tahun Program Bantuan Operasional Sekolah di Indonesia*. Https://Www.Indonesia-Investments.Com/Id/Berita/Kolom-Berita/Bank-Dunia-Mengkaji-10-Tahun-Program-Bantuan-Operasional-Sekolah-Di-Indonesia/Item5650.

World Bank. (2020). *Janji Pendidikan di Indonesia*. Https://Www.Worldbank.Org/in/Country/Indonesia/Publication/the-Promise-of-Education-in-Indonesia.

Kelas Perahu Model Pencegahan Anak Putus Sekolah di Daerah Kepulauan. (2019).

Tanzi;, K. L. C., & Ekaria. (n.d.). *Ketahanan Bersekolah Anak Miskin Usia 10-18 Tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 (Resilience School for Poor Children Aged 10-18 Years in East Nusa Tenggara*.

Martsha, F. (2024). Pengaruh Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan Terhadap Partisipasi Anak Usia Sekolah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, *6*(2), 105–118. https://doi.org/10.17509/jpei.v6i2.75867

World Bank. (2020). *Menciptakan Sistem Pendidikan Abad ke-21: Tiga Laporan Baru Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pembelajaran di Indonesia*. Https://Www.Worldbank.Org/in/News/Press-Release/2020/11/18/Creating-a-21st-Century-Education-System-Three-New-Reports-Address-Indonesia-Learning-Poverty-and-Inequality.

Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Banjarmasin, Pub. L. 17 Tahun 2025 (2025).

Penyelenggaraan Layanan Pendidikn Kelas Perahu Untuk Wilayah Kepulauan Dan Pesisir, Pub. L. 36 Tahun 2019 (2019).

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) , Pub. L. 6 (2023).

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pub. L. 5 (2015).

Quraisy, H., & Arifin, J. (2017a). Kemiskinan dan Putus Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, *4*(2). https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.498

Quraisy, H., & Arifin, J. (2017b). Kemiskinan dan Putus Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, *4*(2). https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.498

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Pub. L. 35 Tahun 2022 (2022).

Rosmini, N., & Istiana, N. (2025). Aplikasi Regresi Logistik Biner Pada Kejadian Putus Sekolah Pekerja Anak Di Pulau Sulawesi. *Jurnal MSA (Matematika Dan Statistika Serta Aplikasinya)*, *13*(2), 41–53. https://doi.org/10.24252/msa.v13i2.57776

Said, K., & Torro, S. (2020). KONTRIBUSI KELAS PERAHU DALAM MENGURANGI ANGKA PUTUS SEKOLAH DI PULAU SALEMO KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA KABUPATEN PANGKEP. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, (2), 25. https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v0i2.14793

Sparrow, R. (2007). Protecting Education for the Poor in Times of Crisis: An Evaluation of a Scholarship Programme in Indonesia*. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, *69*(1), 99–122. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2006.00438.x

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pub. L. 20 tahun 2003.

UNICEF. (n.d.). *Child poverty*. Https://Www.Unicef.Org/Stories/Child-Poverty.

UNICEF Indonesia. (2024). *Cetak Biru untuk Mengembalikan Anak-Anak ke Sekolah di Indonesia Gerakan Nasional untuk Kesempatan Kedua dalam Belajar yang Terus Tumbuh dan Berkembang*. Https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Id/Stories/Cetak-Biru-Untuk-Mengembalikan-Anak-Anak-Ke-Sekolah-Di-Indonesia.